

---

**ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND PROBLEMS OF  
UNDERDEVELOPED VILLAGES IN SOUTH KONAWA  
REGENCY**

**ANALISIS POTENSI DAN PROBLEMATIKA DESA  
TERTINGGAL DI KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**Peribadi**

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo  
Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kelurahan Lalolara,  
Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia  
Email korespondensi: [citaperibadi@gmail.com](mailto:citaperibadi@gmail.com)

---

Diterima: 5 Agustus 2023; Direvisi: 18 September 2023; Disetujui: 21 Oktober 2023

Copyright © 2023 The Author



This is an open access article

under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License

**How to cite (APA):** Peribadi (2023). Analisis potensi dan problematika desa tertinggal di Kabupaten Konawe Selatan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(3), 391–410. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i3.2454>.

**ABSTRACT**

*The presence of rural areas along with their potential and issues appears distinctly different among the statuses of Self-Reliant Villages, Progressive Village, Developing Village, and Underdeveloped Village. This research is aimed at examining and depicting the existence of Underdeveloped Villages, along with all their potential and the societal issues experienced daily. The study employs a quantitative descriptive approach, coupled with an analysis of the Village Development Index (VDI), to comprehensively identify supporting and inhibiting potentials, such as opportunities and challenges. The research results indicate that the potentials and issues of Tambeanga Village in Laonti Subdistrict, South Konawe Regency, as outlined in the context of social resilience with 38 indicators, economic resilience with 12 indicators, and ecological resilience with four indicators, as stated in the instrument of the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016, show the level of being an underdeveloped village, approaching even the status of a severely underdeveloped villages. Various factors contribute to its underdevelopment and backwardness, preventing the optimal utilization of natural resources to build the area and improve its socio-economic well-being.*

**Key words:** *potential, issues, underdeveloped villages*

## ABSTRAK

Keberadaan wilayah pedesaan beserta potensi dan problematikanya, tampak nyata berbeda antara status Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Penelitian ini diarahkan kepada upaya mengkaji dan menggambarkan keberadaan Desa Tertinggal dengan segala potensi yang ada serta problematika masyarakat yang dialami dan dirasakannya sehari-hari. Penelitian menggunakan studi deskriptif kuantitatif yang dirangkaikan dengan analisis Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mengidentifikasi potensi pendukung dan penghambat serta peluang dan tantangannya secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan probematika Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan yang tertuang dalam konteks ketahanan social (*social resilience*) sebanyak 38 Indikator, ketahanan ekonomi (*economic resilience*) sebanyak 12 Indikator dan aspek ketahanan ekologi (*ecology resilience*) sebanyak 4 Indikator sebagaimana tertuang dalam instrumen Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, adalah menunjukkan tingkatan wilayah desa tertinggal dan bahkan mendekati tingkatan desa sangat tertinggal. Berbagai faktor penyebab ketertinggalan dan keterbelakangannya, sehingga potensi sumber daya alam tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun wilayahnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

**Key words:** potensi, problematika, desa tertinggal

---

## PENDAHULUAN

Orientasi pembangunan yang diselenggarakan di daerah pedesaan pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba) tampak lebih diutamakan pada aspek pembangunan fisik material. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri bahwa prestasi material merupakan sebuah lompatan kuantitatif yang sulit dipungkiri kesuksesannya. Namun di balik gegap gempita gemerlapan fisik dan material tersebut, bangsa dan negara kita diperhadapkan dengan kenyataan pahit dalam bentuk pergeseran nilai budaya (*dekulturasi*), pergeseran nilai keagamaan (*despritualisasi*) dan krisis kemanusiaan (*dehumanisasi*) serta degradasi etika moral (*demoralisasi*) yang kemudian menggelejar sampai pada petaka *ilegal logging* dan eksploitasi hutan belantara dengan berbagai implikasi sosialnya yang kini sudah terasa sangat sulit diantisipasi.

Ketimpangan struktural yang kini telah menimbulkan ketertinggalan wilayah pedesaan serta kesenjangan sosial ekonomi, sesungguhnya merupakan biang keladi dari paradigma pertumbuhan ekonomi yang hanya menempatkan segelintir orang kaya kian menjadi kaya dan orang miskin menjadi kian miskin, daerah maju dan termasuk daerah terbelakang serta desa maju dan desa terbelakang. Menurut hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tentang keberadaan indeks desa tertinggal terdapat sebesar 17,96 persen, namun sudah menurun hingga mencapai sebesar 9,578 % yang pada tahun 2014 masih ditemukan sekitar 26,81 persen. Sementara desa berkembang di tahun 2018

menempati posisi persentase sebesar 54.879 atau 74,49 %, sehingga tergolong paling besar sebagai desa berkembang secara keseluruhan di Indonesia. Sementara narasi tentang wilayah terbelakang dan tertinggal tampak erat kaitannya dengan faktor kesenjangan dan kemiskinan (Albab et al., 2019; Thamrin et al., 2020).

Upaya membangun dan mengembangkan daerah perkampungan yang kategori desa yang masih tertinggal dan desa sangat tertinggal menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri, maka sangat dibutuhkan pendekatan proporsional dan intervensi kebijakan yang konstruktif serta strategi pembangunan wilayah pedesaan berbasis kultural dan spiritual. Hal itu sangat penting, karena tampak fenomenal aneka masalah yang dirasakan bagi masyarakat wilayah terbelakang, terutama pada Desa Tertinggal. Di antaranya adalah terbatasnya sumber daya alam, rendahnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas transportasi, minimnya instrument komunikasi, kurangnya pelayanan kesehatan, kurangnya mutu pendidikan, masalah kepemimpinan dan rendahnya partisipasi masyarakat serta cenderung berkubang kemiskinan, sehingga sangat dibutuhkan sebuah formulasi kebijakan program pembangunan yang tepat sasaran (Albab et al., 2019; Peribadi, dkk., 2021; Hidayati, 2021; Xaverius et al., 2021).

Sementara itu, dalam rangka mengkaji Potensi dan Problematika Desa Tertinggal di Wilayah Pedesaan dalam perspektif Indeks Desa Membangun (IDM), maka terlihat dengan terang benderang semua potensi sumber daya yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan (*strength*) dan sebagai peluang untuk ditumbuhkembangkan serta aneka problematika kehidupan sebagai kelemahan (*weakness*) dan tantangan (*threats*) yang dapat diantisipasi, dan bahkan harus dirubah menjadi peluang dalam membangun masyarakat desa tertinggal. Dalam konteks ini, maka berdasarkan analisis SWOT dapat disebutkan bahwa kekuatan dan kelemahan sumber daya sebagai permasalahan internal serta peluang dan ancaman ekosistem sebagai permasalahan eksternal, merupakan unsur pendorong dan penghalang untuk memperbaiki sebuah daerah tertinggal (Asy Syahid & Suwarni, 2018; Kristanto et al., 2020; Suwarno & Pramono, 2020; Yasni, 2021).

Sehubungan dengan itu, berdasarkan laporan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia bahwa ada 3 (tiga) kendala dan rintangan yang diperhadapkan dalam proses penyelenggaraan pembangunan wilayah pedesaan, yakni (1) pada umumnya masyarakat belum merasa tertarik dengan keberadaan di pedesaan; (2) akibatnya rendahnya lapangan kerja yang disediakan di pedesaan, sehingga menyebabkan terjadinya lonjakan urbanisasi; (3) keberadaan petani miskin di pedesaan yang sangat memprihatin, sehingga ikhwil ini pada umumnya merupakan ciri khas tersendiri bagi wilayah pedesaan. Karena itu, dalam rangka memahami secara

lebih khusus atas realitas kehidupan di pedesaan, maka seyogyanya terlebih dahulu sangat penting diupayakan pemetaan potensi pedesaan (Hardiningtyas et al., 2019).

Karena itulah, maka yang menjadi fokus dan ruang lingkup permasalahan adalah berupaya menggambarkan potensi dan problematika sosial yang terkandung dalam sebuah wilayah pedesaan yang kategori tertinggal dalam konteks *social resilience*, *economic resilience* dan *ecology resilience*. Kemudian berupaya mengkaji penyebab masalah kemajuan sebagai kekuatan dan pendukung serta keterbelakangan sebagai kelemahan dan ancaman atas keberadaan sebuah wilayah pedesaan tertinggal serta menawarkan sebuah strategi pembangunan pedesaan yang harus diterapkan dalam rangka membangun desa-desa tertinggal sebagai solusi alternatif, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menuju wilayah pedesaan yang berstatus berkembang, maju dan Mandiri.

Menurut Ratnadila (dalam Pradana & Muin, 2020) bahwa daerah terbelakang adalah sebagai daerah yang keadaannya masih tergolong ketinggalan, terutama jika dikaitkan dengan daerah lainnya. Potret kemiskinan pada sebuah wilayah pedesaan merupakan ciri khas yang menandai pertumbuhan dan keterbelakangan sebuah wilayah tertentu. Sedangkan menurut Trinanda & Santoso (dalam Pradana & Muin, 2020) bahwa pada dasarnya, pedesaan yang terbelakang adalah disamakan dengan keadaan warganya yang masih kategori miskin. Adapun salah satu faktor penyebabnya adalah selain keadaan geografis desa yang terisolir dari sentral pembangunan, juga sumber daya manusianya yang masih memprihatinkan. Karena itu, pembangunan infrastruktur desa tertinggal harus memperhatikan faktor demografi di wilayah tersebut (Geni et al., 2020). Pasaunya, menurut (Augustine et al., 2019) bahwa pembangunan desa-desa terbelakang harus berlangsung secara terintegral antara berbagai aspek sosial seperti unsur sosial, ekonomi, budaya dan keamanan, termasuk perihal hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

Akhirnya, upaya menumbuhkan pembangunan daerah pedesaan dari keadaannya sebagai desa yang tergolong tertinggal menuju kepada wilayah pedesaan yang berkembang serta menjadi desa maju dan mandiri, maka bagi Mandasari (2021) bahwa wilayah pedesaan harus menerapkan beberapa langkah strategis, yakni: (1) memudahkan pelaksanaan birokrasi serta mendukung berbagai aktivitas yang berorientasi kepada pembangunan; (2) meningkatkan Sumber Daya Manusia sebagai aparat pedesaan dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan serta melibatkan warga dalam pembangunan; (3) menyelenggarakan musyawarah desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat dari kalangan tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan tokoh agama; dan (4) mengutamakan dan mengembangkan usaha yang produktif.

Seiring dengan itu, menurut Rukayat et al., (2021) bahwa pendekatan pemerintahan yang bergaya kewirausahaan merupakan salah satu strategi yang sangat mendesak bagi aparat pemerintah pedesaan dan warga masyarakat yang sudah lama terbelakang dalam pembangunan dengan cara kewirausahaan yang dapat membuka kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan gebrakan kemajuan.

Karena itu, Jannah & Muchlisoh (2021) menyarankan bahwa pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur serta juga sangat perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Akan tetapi, potensi dan problematika lain yang tak kalah urgensinya adalah modal sosial, karena menurut Prayitno et al., (2019) bahwa warga masyarakat yang mempunyai hubungan atau jaringan sosial yang luas, maka sudah pasti dapat memiliki strategi ketahanan pangan. Demikian pula bagi warga masyarakat yang tinggi ketaatannya kepada norma budaya dan agama, juga pasti mempunyai ketahanan pangan yang tinggi. Adapun potensi dan problematika yang lebih aplikatif adalah kapasitas seorang Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di wilayah pemerintahannya. Dalam konteks ini, menurut Eka et al., (2021) bahwa kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misinya yang diperkuat dalam kegiatan rencana kerja pemerintah desa setiap tahunnya yang dilaksanakan dalam Musrembang desa.

Secara empirik, wilayah pedesaan merupakan sebuah perkampungan yang sejuk, segar, indah dan tenang serta mensejahterakan penghuninya dan sekaligus menyelenggarakan proses pembangunan pedesaan secara partisipatif (Adhi Iman Sulaiman dan Toto Sugito, 2019). Demikian pula menurut Zuliansyah et al., (dalam Xaverius et al., 2021) bahwa desa merupakan sebuah potret pemerintahan yang representatif sebagai wilayah perkampungan bagi warga pedesaan yang menggambarkan keberadaannya sebagai masyarakat alamiah sesuai dengan identitas lokal dan nilai-nilai budayanya. Namun kini, tampak nyata keberadaan desa yang kategori terbelakang dan bahkan sangat terbelakang lebih dominan ketimbang keberadaan Desa Berkembang dan Desa Maju serta apalagi ketika menyoal keberadaan Desa Mandiri. Secara khusus untuk desa-desa yang kategori terbelakang, maka menurut Puspasari dan Koswara (2019) ada beberapa variabel yang berpengaruh atas ketertinggalan sebuah wilayah pedesaan, yakni: (1) tingkat pendidikan warganya yang dominan berpendidikan dasar dan menengah pertama; (2) penduduknya dengan tingkat persentase tertinggi dalam kategori keluarga miskin; (3) ditandai oleh sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan dalam tingkatan persentase SD, SMP dan rumah permanen; dan (4) unsur infrastruktur ekonomi yang berintikan pada aspek pengguna PLN, PDAM, toko, dan berbelanja di warung.

Searah dengan itu, menurut Eka et al., (2021) bahwa terlihat unsur-unsur

penghalang yang menyebabkan kurang berdayanya organisasi pedesaan terhadap penyelenggaraan Musrenbang, yakni: (1) kualitas dan kapabilitas aparatur desa yang masih minim pengetahuan; (2) rendahnya keterampilan dan keahlian (skill) dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa; (3) masih kurang pemahamannya mengenai tata cara berorganisasi dan manajemen yang benar; (4) kurang efektivitasnya proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan wilayah pedesaan; (5) masih kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan wilayah pedesaan; (6) efektivitas program pemberdayaan dan pendampingan yang masih lemah; dan (7) belum berlangsung proses integrasi dan interdependensi proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan di pedesaan. Ikhwal itulah dimaksud Yasni (2021) bahwa strategi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sumber daya manusia di wilayah pedesaan tampak belum merata dan tidak seragam, sehingga membuahakan masalah kesenjangan dan ketimpangan. Potret fenomenal dan kenyataan empirik seperti inilah yang sesungguhnya terjadi di wilayah pedesaan Kabupaten Konawe Selatan, terutama di wilayah pedesaan yang terisolir seperti Desa Tambeanga Kecamatan Laonti.

## **METODE PENELITIAN**

Sesuai fokus dan ruang lingkup permasalahan untuk menggambarkan potensi dan problematika sosial wilayah pedesaan tertinggal, maka penelitian bertujuan untuk menarasikan ketahanan sosial (*social resilience*), ketahanan ekonomi (*economic resilience*) dan ketahanan ekologi (*ecology resilience*) Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam konteks ini, tipe penelitian deskriptif kuantitatif adalah tidak dimaksudkan untuk melihat dan menemukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sebagai upaya membandingkan dua variabel serta menemukan sebab dan akibat. Akan tetapi, deskriptif kuantitatif adalah dimaksudkan sebagai upaya mendeskripsikan atau menafsirkan data kuantitatif pada level deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang representatif atas keberadaan desa-desa tertinggal dengan berbagai problematikanya (Peribadi dan Anggraeni, 2022).

Semua komponen masyarakat yang berdomisili di Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan yang dianggap mampu menjelaskan potensi dan permasalahan desanya, maka dipilih dan ditetapkan sebagai sumber informasi penunjang dengan teknik bola salju. Sedangkan untuk memperoleh informasi perihal Indeks Desa Membangun (IDM) dalam konteks Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan yang tertuang dalam instrumen kementrian, maka dipilih sejumlah responden secara purposive sampling.

Dalam rangka mengumpulkan data tentang potensi dan problematika pedesaan tertinggal ini, maka dikembangkan melalui teknik wawancara bebas dan terbuka dengan informan yang berhasil ditemui secara *snow balling* dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Sedangkan untuk mengetahui gambaran tentang Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebanyak 38 Indikator dan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebanyak 12 Indikator serta Indeks Ketahanan Lingkungan sebanyak 4 Indikator, digunakan instrumen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

Semua jenis data yang telah dikumpulkan, baik yang bersumber dari hasil wawancara mendalam dan terutama dari hasil pengisian instrumen kementerian dimaksud, dianalisis dengan metode deskriptif. Dalam konteks ini, data kuantitatif yang terdiri atas: (1) Indeks Ketahanan Sosial (IKS); (2) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan (3) Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dianalisis dengan formulasi Indeks Desa Membangun (IDM), yakni :

$$\text{IDM} = \frac{1}{3} (\text{IKL} + \text{IKE} + \text{IKS})$$

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0-1.

$$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai Maksimum } (X)}$$

*Nilai Maksimum (X)*

Y = Komponen indeks yang terdiri dari : IKL, IKE dan IKS

X = Indikator (X)

Artinya,  $1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$  yang menunjukkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebanyak 38 Indikator  $\times 5 = 190$ ; Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebanyak 12 Indikator  $\times 5 = 60$ ; dan Indeks Ketahanan Lingkungan sebanyak 4 Indikator  $\times 5 = 20$ . Akan tetapi, hasil identifikasi Indeks Desa Membangun tersebut, lebih lanjut dikembangkan dengan analisis deskriptif untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal penyebab keterbelakangan dan ketertinggalan sebuah wilayah pedesaan yang kategori tertinggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, ada 7 (tujuh) wilayah pedesaan tertinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang berhasil diteliti dan dinarasikan dalam laporan penelitian. Akan tetapi, secara khusus yang dinarasikan dan dideskripsikan serta dituangkan dalam tulisan ini adalah gambaran tentang ketahanan sosial (*social resilience*), ketahanan ekonomi (*economic resilience*) dan ketahanan ekologi (*ecology*)

resilience) Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. Dalam perspektif Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Ketentuan Permendesa tahun 2016 disebutkan bahwa Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) yang juga disebut sebagai Desa Pratama merupakan sebuah wilayah pedesaan dengan keadaan sosial ekonomi yang kategori paling terbelakang, karena hanya mencapai nilai kurang atau lebih kecil dari nilai hasil perhitungan sebesar 0,4907.

Potret fenomenal atas keberadaan Desa Tambeanga Kecamatan Laonti yang kategori sangat tertinggal adalah berarti menunjukkan bahwa dinamika kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat adalah stagnan tanpa pertumbuhan yang cukup signifikan. Selain tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya sehari-hari, keberadaan masyarakat pada wilayah pedesaan tersebut juga mengalami kesulitan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada. Pada gilirannya, menyebabkan warga masyarakat setempat senantiasa berada dalam kondisi kehidupan yang memprihatinkan, karena tidak dapat memenuhi ketiga indeks kehidupan dimaksud sesuai ketentuan PermenDesa tahun 2016. Meskipun memang tidak selalu mencerminkan ketidaktersediaan tiga dimensi ketahanan secara bersamaan, tetapi karena jumlah satu indeks ketahanan sosial jauh dari jumlah maksimum Indeks Desa Membangun. Maka pada gilirannya sangat mempengaruhi keberadaannya sebagai Desa Sangat Tertinggal.

### **Dimensi Kesehatan**

Hasil perhitungan (FH) dan hasil observasi (FO) atas Indeks Ketahanan Sosial (IKS), ternyata keberadaan wilayah Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dapat dikategorikan sebagai Desa yang sangat tertinggal, karena hanya mencapai skor nilai sebanyak 0,48 atau kurang dari 0,491. Pada aspek dimensi ketahanan sosial desa yang diturunkan dalam indikator variabel kesehatan, variabel pendidikan, variabel Modal sosial, dan variabel pemukiman. Jika dilihat dari tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Tambeanga berdasarkan rata-rata ambang batas yang telah disesuaikan dengan IDM (Indeks Desa Membangun) dari nilai skor 1 s.d 5 menunjukkan indikator tingkat akses kesehatan Desa Tambeanga masih sangat rendah sebagaimana hasil identifikasi data yang tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks kesehatan

No	Dimensi Kesehatan	Point
1	Waktu tempuh ke prasarana kesehatan > 30 Menit	5
5	Tersedia tenaga kesehatan bidan	0
1	Tersedia tenaga kesehatan dokter	0

No	Dimensi Kesehatan	Point
1	Tersedia tenaga kesehatan lain	0
1	Akses ke poskesdes dan posyandu	5
5	Tingkat aktivitas posyandu	5
3	Tingkat kepesertaan BPJS	5
4	<b>J u m l a h</b>	20
	20	

Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022

Keterbatasan desa mendapatkan pelayanan kesehatan, terlebih saat pandemi masih mencekram hampir semua kalangan masyarakat sangat membutuhkan perlindungan kesehatan, sehingga secara gamblang dapat ditandakan bahwa warga desa juga membutuhkan hak untuk “Sehat”. Kritikan ini muncul atas kegelisahan masyarakat miskin, terlebih pada desa yang berstatus tertinggal ada stigma bahwa “Orang miskin dilarang sakit”. Tampaknya, guyonan ini muncul karena seringkali pada desa tertinggal atau penduduk miskin yang ada di desa pinggiran kurang diprioritaskan. Desa tertinggal dan berada jauh di pulau sebagai warga masyarakat yang biasanya paling belakang mendapatkan pelayanan kesehatan seperti di Desa Tambeanga, ketersediaan material kesehatan berupa obat-obatan dan tenaga kesehatan medis masih sangat minim, sehingga sangat sulit ketika warga masyarakat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan informasi dari salah satu tenaga pengajar yang pernah tinggal di Desa Tambeanga, maka pada dasarnya fasilitas kesehatan yang dapat dijumpai dengan waktu tempuh kurang dari 30 menit disesuaikan dengan indikator IDM yaitu Polindes. Hanya saja prasarana tersebut sangat jarang difungsikan sebab tenaga kesehatan sangat terbatas dan biasanya tenaga kesehatan yang bertugas adalah bidan desa dari seberang pulau. Dalam konteks ini, menurut Yusran sebagai salah seorang tenaga pengajar Sekolah Dasar di Desa Tambeanga bahwa:

“Poskesdes ada tapi tidak berfungsi dengan baik dan ketersediaan obat sangat terbatas. Kegiatan berposyandu saja sangat jarang dilakukan, jadi bisa dibilang bermodal obat herbal saja. Tenaga kesehatan yang bisa diharap kalo sakit tidak ada soalnya pada jauh tempatnya dan bidan yang bertugas diambil dari desa seberang” (Wawancara, 1 Juli 2022).

Akses pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh di Desa Tambeanga yaitu Polindes dan Posyandu, meski tidak didukung dengan ketersediaan tenaga medis seperti bidan ataupun, sehingga pemberian skor untuk akses ketersediaan tenaga kesehatan memperoleh poin 1 (satu) sebab di Desa Tambeanga masih terbatas tenaga kesehatan medis yang bertugas. Dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis dari dokter, maka warga harus menempuh jarak 60 KM atau kurang lebih 4 jam ke rumah sakit Kota Kendari untuk bisa

mendapatkan penanganan medis yang memadai. Pada kondisi lainnya warga juga sangat jarang mendapatkan kunjungan atau penyuluhan dari pihak kesehatan mengingat jarak Desa Tambeanga cukup terpencil dan terletak sangat jauh dari Puskesmas Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.

### **Dimensi Pendidikan**

Pendidikan salah satu tolak ukur untuk membangun Indonesia dimulai dari daerah atau desa pinggiran, juga menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia sebagai upaya memprakarsai pembangunan di desa-desa tertinggal. Dalam hal ini, pendidikan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat membuka pengetahuan masyarakat lebih terarah yang diharapkan dapat berkontribusi memberikan inovasi dan pengawasan dalam setiap pengaturan atas intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Mengacu dari instrument IDM potensi akses pendidikan desa dapat diidentifikasi dari ketersediaan fasilitas pendidikan, kegiatan untuk mengurangi buta huruf, dan ketersediaan fasilitas taman bacaan atau perpustakaan desa dapat dilihat dalam table 2.

Tabel 2. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks pendidikan

No	Dimensi Pendidikan	Point
1	Akses pendidikan ke SD > 3 Km	5
2	Akses pendidikan SMP/Mts > 6 Km	5
3	Akses pendidikan SMA/SMK >6 Km	5
4	Kegiatan buta aksara	0
5	Kegiatan PAUD	0
6	Kegiatan PKBM	0
7	Akses ke pusat kursus/keterampilan	0
8	Taman bacaan masyarakat desa	0
<b>J u m l a h</b>		<b>15</b>

Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022

Terkait komponen yang menjadi salah satu tolak ukur IDM dalam melihat potensi desa, aspek pendidikan wilayah Desa Tambeanga dari segi fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh warga adalah Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jarak  $\leq 3$  Km dan Pendidikan Sekolah Menengah (SMP) yang harus ditempuh tidak lebih dari 6 Km. Sedangkan untuk Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada di Desa Tambeanga, sehingga banyak warga tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena terbatasnya akses sekolah dan beratnya tantangan setiap hari karena harus melewati laut untuk ke desa seberang bagi mereka yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tambeanga dapat dikategorikan rendah sebagaimana halnya dengan status ketersediaan akses kesehatan tersebut di atas.

Bertolak dari target sasaran yang hendak diberdayakan oleh Kementerian Desa, Tertinggal, dan Transmigrasi yang tertuang dalam Indeks Membangun Desa. Maka salah satu unsur yang sangat ditekankan oleh kementerian adalah potensi pengembangan sumber daya manusia yang dapat ditempuh lewat pengasahan *skill* dan menempuh jenjang pendidikan tinggi. Sementara ihwal pendidikan di pedesaan sangat berperan penting dalam menumbuhkan potensi desa yang masih tertinggal menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Jika dihubungkan dengan konteks pendidikan di Desa Tambeanga untuk menjadi Desa Mandiri, maka masih sangat dibutuhkan upaya yang lebih gesit untuk dapat meningkatkan berbagai aspek dimensi ketahanan sosial sesuai standar nilai maksimal IDM. Pemberdayaan sumber daya manusia seperti pendidikan non formal berupa pelatihan, ketersediaan fasilitas ruang baca desa, dan pendidikan formal melalui sekolah adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan warga Desa Tambeanga dalam rangka mendukung taraf kesejahteraan masyarakat desa yang masih dikategorikan tertinggal.

### **Dimensi Modal Sosial**

Modal sosial yang dapat menjembatani warga Desa di Tambeanga adalah masih menguatnya sistem kekerabatan, sehingga ketika muncul konflik sosial dapat diminimalisir melalui penyelesaian secara adat. Warga masyarakat di Desa Tambeanga masih sangat memegang teguh adat istiadat *kalosara* yang dianut oleh etnis Tolaki sebagai simbol kolektivitas atas rasa persatuan dan persaudaraannya. Karena itu, maka tidak mengherankan jika sistem kekerabatan hingga saat ini masih menguat di Desa Tambeanga sebagai aspek metodologis dalam menyelesaikan konflik yang mengemuka di dalam masyarakat Desa Tambeanga. Adapun keanekaragaman yang dapat ditemukan di sekitar Desa Tambeanga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe ini, dapat dilihat dari segi perbedaan suku yang mayoritas penduduknya Suku Tolaki dan selebihnya adalah Suku Tomia. Akan tetapi, suku Tolaki yang mayoritas sebagai penduduk lokal tidak merasa ada sekat-sekat yang dapat menyurutkan rasa persaudaraan antara warga antara komunitas Tolaki dan komunitas Tomia di Tambeanga. Dalam konteks ini, menurut La Ata sebagai putra kelahiran Desa Tambeanga bahwa:

“Warga masyarakat Desa Tambeanga Kecamatan Laonti dari kedua kedua kelompok suku bangsa tersebut adalah bukan hanya mereka hidup berdampingan sepanjang masa. Akan tetapi, mereka pada dasarnya sudah merasa tidak ada lagi simbol-simbol etnis bahwa saya orang Tolaki dan dia adalah orang Tomia. Lebih dari itu, mereka pun sudah banyak yang kawin mawin di antara kedua etnis tersebut” (Wawancara, 3 Agustus 2022).

Tabel 3. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks modal sosial

No	Dimensi Modal Sosial	Point
1	Kebiasaan gotong royong desa	1
2	Adanya ruang publik terbuka yang tidak berbayar di desa	1
3	Tersedianya fasilitas olah raga	1
4	Terdapat kelompok olahraga	1
5	Warga desa terdiri dari beberapa suku dan etnis	3
6	Warga sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda	2
7	Terdapat keragaman agama di desa	1
8	Warga desa membangun pemeliharaan poskamling	1
9	Partisipasi warga mengadakan siskamling	1
10	Tingkat kriminalitas yang terjadi di desa	4
11	Tingkat konflik yang terjadi di desa	4
12	Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di desa	5
13	Terdapat akses sekolah luar biasa	1
14	Terdapat penyandang kesejahteraan sosial	5
15	Terdapat masyarakat bunuh diri	5
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>

Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022

Indikator ketahanan sosial dalam aspek modal sosial Desa Tambeanga, maka berdasarkan hasil observasi menunjukkan modal sosial yang cukup bagus nilainya. Dalam konteks ini, kasus kriminalitas tampak sangat rendah dan semua jenis konflik diselesaikan dengan acara adat istiadat serta berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Berdasarkan hasil observasi dan pencocokan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa suasana yang kondusif inilah yang menyebabkan tingkat keamanan warga Desa Tambeanga cukup tinggi. Namun jika dibandingkan dengan aktivitas kegotong royongan, tampaknya warga masyarakat Desa Tambeanga sudah mengalami pergeseran karena mulai berkembang sebuah pandangan bahwa dalam setiap aktivitas kegotong royongan seperti kerja bakti, warga merasa perlu ada kompensasi. Artinya tingkat solidaritas dalam bentuk kepedulian warga sebagai satu kesatuan dalam membangun desa sudah mulai bergeser sebagaimana tertuang dalam dalam tabel 3.

Selanjutnya pada ruang publik terbuka yang tidak berbayar juga tidak ada, mengingat warga Desa Tambeanga berada di Wilayah pesisir jadi tidak begitu luas wilayahnya untuk dibangun untuk menjadi ruang publik. Hal itu, tidak terlalu penting bagi mereka karena sepanjang pesisir pantai dapat dijadikan sebagai ruang public yang lebih menyenangkan. Untuk keseharian warga Desa di Tambeanga biasanya fasilitas olahraga yang dapat digunakan adalah olahraga bola voli, namun kegiatan olahraga yang dilakukan tidak terorganisir yakni tidak ada kelompok olahraga khusus di Desa Tambeanga.

Hanya saja kekurangan yang ditemukan yakni dari segi fasilitas sosial yang tidak ditemukan di Desa Tambeanga adalah fasilitas siskamling sebab wilayah Desa sangat minim terjadi kriminalitas, sehingga bagi warga Desa siskamling tidak begitu berfungsi atau dibutuhkan. Sedangkan pada indikator akses sekolah luar biasa dan akses penyandang kesejahteraan sosial tidak ditemukan di Desa Tambeanga, karena hal ini memang tidak ditemukan warga yang mempunyai kebutuhan khusus.

### **Dimensi Pemukiman**

Pemukiman warga Desa Tambenga Kecamatan Laonti adalah sangat berdekatan dengan laut, sehingga masyarakat Desa Tambeanga sangat sulit mendapatkan akses sumber air untuk dikonsumsi sehari-hari. Biasanya warga menggunakan air PAM untuk kebutuhan sehari-hari (mencuci dan mandi). Hanya saja air PAM yang dialirkan kerumah-rumah warga tidak selamanya dapat digunakan sebab ketika musim hujan airnya sangat keruh dan di musim kemarau terkadang tidak bisa mengalir. Menurut informasi dari beberapa informan memberi pandangan yang sama bahwa biasanya “warga membeli air galon yang dibeli dari Kendari dan pada aspek sanitasi di rumah warga Desa Tambeanga yang memiliki jamban dan tempat pembuangan sampah rumah tangga masih sangat memprihatinkan. Mungkin karena letak wilayahnya di pinggiran laut, sehingga jamban sangat terbatas dan hanya sebagian rumah saja yang difasilitasi dengan jamban. Mungkin seperti itulah keadaan masyarakat yang berada di pesisir pantai, mereka pada umumnya membuang limbah rumah tangga ke laut. Begitupun untuk tempat pembuangan sampah umum tidak ditemukan, sehingga warga biasanya hanya mengumpulkan di pekarangan rumah atau menggali tanah untuk ditimbun dan dibakar”.

Tabel 4. Analisis indikator desa sangat tertinggal konteks permukiman

No	Dimensi Permukiman	Point
1	Masyarakat penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak	1
2	Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci	3
3	Mayoritas penduduk desa memiliki jamban	1
4	Terdapat tempat pembuangan sampah	1
5	Mayoritas desa memiliki aliran listrik	2
6	Penduduk desa memiliki telepon seluler dan sinyal kuat	1
7	Terdapat televisi, lokal, nasional dan internasional	2
8	Terdapat akses internet	1
<b>J u m l a h</b>		<b>12</b>

Sumber data: Hasil Identifikasi di Wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022

Secara khusus untuk indikator akses listrik warga masyarakat di Desa Tambeanga rata-rata hampir di setiap perumahan warga hanya mengandalkan

Pembangkit Tenaga Listrik Surya (PLTS). Penggunaan tenaga surya sebagai daya dukung untuk penerangan rumah warga sangat terbatas digunakan, penerangan hanya bertahan sekitar jam 6:00 malam hingga jam 8:00 malam yaitu 3 jam saja dan sangat tergantung dengan kondisi cuaca, Jika musim hujan warga hanya bisa menggunakan lampu minyak selebihnya biasanya memanfaatkan *accu* atau aki untuk penerangan, terutama kalau mereka ingin menonton Televisi. Demikian pula dengan akses informasi dan komunikasi juga masih sangat terbatas, karena sinyal di Desa Tambeanga kurang kuat, sehingga warga selalu mencari posisi dataran tinggi untuk mencari sinyal yang sangat rendah seperti ditampilkan pada tabel 4.

Karena itu, ketika masa pandemi masih berlangsung anak sekolah menerapkan sistem daring (sistem sekolah *online*), namun dengan sangat terpaksa anak sekolah di Desa Tambeanga harus berjalan ke wilayah pegunungan jika mereka ingin mengikuti kegiatan belajar daring. Menurut penuturan warga di Desa Tambeanga biasanya belajar mengajar secara tatap muka hanya berlangsung sekali dalam sebulan dan bahkan anak sekolah sudah jarang sekali belajar, karena terlalu lama libur dari kegiatan pembelajaran luring (pembelajaran tatap muka atau *offline*). Karena itu, sistem pembelajaran online atau daring sangat tidak efektif, terutama pada wilayah pedesaan yang masih terpinggir seperti misalnya Desa Tambenga yang sangat kesulitan akses internet.

### **Dimensi Ekonomi**

Sesuai dengan indikator variabel dimensi ekonomi berdasarkan IDM, keragaman produksi masyarakat Desa Tambeanga pada indikator jenis kegiatan ekonomi penduduk ditemukan lebih dari satu kegiatan yaitu pertanian jangka panjang cengkeh dan pala yang biasanya didistribusikan ke Kota Kendar. Sedangkan usaha perdagangan (warung) atau kios kecil dapat ditemukan di Desa Tambeanga. Adapun usaha menangkap lebih dominan dilakukan oleh nelayan warga Tomia yang ada di Desa Tambeanga.

Karena itu, meskipun masyarakat Desa Tambeanga berada di wilayah pesisir, tetapi tidak semua warga melakukan aktivitas melaut atau menangkap ikan. Adapun mereka yang bekerja sebagai nelayan kebanyakan adalah Suku Tomia dan suku Tolaki lebih memilih kegiatan berkebun. Pada akses pelayanan perdagangan untuk keperluan konsumsi rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari dapat memanfaatkan warung dan pasar desa. Semnetara untuk kebutuhan yang lebih kompleks atau barang yang tidak ada dijual di Desa seperti peralatan rumah tangga lainnya, maka biasanya warga harus menyeberang lagi dengan menggunakan perahu ke Kota Kendari sebagaimana terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Analisis indikator Desa Sangat Tertinggal dalam konteks ekonomi

No	Dimensi Ekonomi	Point
1	Lebih dari satu kegiatan ekonomi penduduk	4

No	Dimensi Ekonomi	Point
2	Akses masyarakat ke pusat perdagangan seperti pertokoan dan pasar	4
3	Terdapat sektor perdagangan di pemukiman	5
4	Terdapat usaha kedai makanan, hotel, dan penginapan	1
5	Terdapat kantor pos dan logistik	1
6	Tersedianya lembaga perbankan umum	1
7	Tersedianya BPR	1
8	Akses penduduk ke kredit	1
9	Tersedia lembaga ekonomi rakyat (koperasi)	1
10	Jalan dapat dilalui oleh kendaraan	1
11	Kualitas jalan desa (aspal, kerikil, pengerasan)	1
12	Terdapat modal transportasi umum	1
<b>J u m l a h</b>		<b>22</b>

Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022

Kondisi Desa Tambeanga sangat sulit untuk dijangkau oleh transportasi umum seperti kendaraan roda empat karena letak Desa yang berada di pulau, sehingga mereka hanya mengandalkan jalur laut dengan menggunakan perahu sebagai transportasi umum. Demikian dengan akses logistik berupa kantor pos dan berbagai jasa logistic, juga tidak ada di Desa Tambeanga. Apalagi untuk Lembaga perbankan umum, sehingga akses penduduk dengan pengambilan kredit sangat sulit dilakukan, karena kesemuanya membutuhkan akses aliran listrik yang tidak hanya mengandalkan tenaga surya atau baterai aki sebagai sumber daya penerangan. Akan tetapi, juga sangat membutuhkan daya dukung akses internet yang kuat untuk bisa beroperasi pada segala jenis kegiatan administrasi dengan cepat dan efisien. Jalan yang dapat dilalui dengan roda empat tidak ada, sebab jalan penghubung ke Desa Tambeanga adalah dikelilingi oleh laut dan pegunungan. Sedangkan jalanan umum desa yang sering dilalui warga sehari-hari, pun belum diaspal hingga saat ini.

### **Dimensi Ekologi**

Secara ekologi Desa Tambeanga berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan instrumen IDM, maka kondisi wilayah ekologi Desa Tambeanga tergolong cukup baik karena belum tercemar oleh limbah industri atau belum terjadi bencana alam yang serius. Upaya penanganan dini yang cukup tanggap terhadap bencana yang dilakukan oleh Pemerintah bersama warga Desa Tambeanga adalah berupa pembuatan tanggul untuk menghindari pengikisan laut atau abrasi. Nilai skor pencemaran air dikurangi satu poin sebab sampah rumah tangga yang dialirkan ke laut akibat dari kurangnya warga yang memiliki jamban khususnya yang bermukim di pinggiran laut dapat menyebabkan pencemaran air laut. Upaya lain dalam mengatasi persoalan ini terkait pengadaan jamban atau fasilitas WC umum masih belum ada, sehingga

mempengaruhi status Desa Tambeanga masuk dalam kategori Desa Sangat Tertinggal.

Menurut informasi dari beberapa mahasiswa kelahiran Desa Tambeanga bahwa biasanya untuk pemanfaatan Dana Desa lebih banyak difokuskan pada pembuatan tanggul di pinggiran laut untuk menahan erosi atau terjadinya pengikisan serta pembuatan jalan tani dengan mendatangkan *excavator* untuk dapat memperluas badan jalan desa. Selain itu penggunaan dana desa juga diperuntukkan pembuatan dermaga agar memudahkan akses warga yang hendak menyebrang ke desa lain. Hanya saja, belum ada inisiatif untuk memperbaiki jembatan penghubung yang rusak berjarak 100 km ke pemukiman dusun warga Tomia yang merupakan bagian dari Desa Tambeanga. Hal ini semakin menyulitkan warga mendapatkan akses informasi cepat jika ada kegiatan di desa atau hendak ke pasar desa bagi warga di dusun seberang yang menggunakan perahu. Namun, dalam konteks ekologi yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan pihak atau oknum yang dapat merusak keseimbangan ekosistem laut di Desa Tambeanga yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan menyebabkan kerusakan terumbu karang dan merusak ekosistem laut lainnya. Adapun rincian hasil identifikasi Indeks Ketahanan Ekologi Desa Tambeanga ditampilkan pada tabel 6.

Tabel 6. Analisis indikator desa sangat tertinggal dalam konteks ekologi

No	Dimensi Ekologi	Point
1	Ada atau tidaknya pencemaran air, tanah, udara	4
2	Terdapat sungai yang terkenah limbah	5
3	Kejadian bencana alam	4
4	Upaya penanganan bencana	4
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

Sumber data: Hasil identifikasi di wilayah Desa Tambeanga, tahun 2022

Ketahanan ekologi pada desa tertinggal seperti Desa Tambeanga menunjukkan ke arah positif jika dibandingkan dengan aspek ketahanan sosial dan ekonomi, karena potensi alam yang masih terjaga baik dan jauh dari pencemaran limbah berat industry. Hanya ini yang menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan desa terpencil, meski yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi adalah eksploitasi bahari yang merugikan pemukiman wilayah pesisir dan kelangsungan ekologi di Desa Tambeanga. Sesungguhnya ekologi tidak saja sebagai entitas yang selalu menjadi objek eksploitasi dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat, tetapi seharusnya antara masyarakat (sosial) dan lingkungannya (ekologi) harus saling berkaitan. Dalam konteks ini, pada satu sisi ekologi dimanfaatkan sebagai sumber daya penyedia kebutuhan masyarakat, namun pada sisi lain masyarakat perlu menjaga keseimbangan

lingkungannya agar tetap lestari untuk menghindari perubahan ekologi berupa bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

*Pertama*, tipologi wilayah perdesaan dalam kategori sebagai Desa Mandiri (Sembada), Desa Maju, Desa Berkembang (Madya), Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, adalah tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika sosialnya masing-masing. Hasil penelitian yang mengacu dari instrument kementerian desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, adalah menunjukkan bahwa dari sejumlah 336 wilayah pedesaan serta sebanyak 15 wilayah kelurahan yang ada Kabupaten Konawe Selatan, ternyata masih sebagian besar berstatus sebagai Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Dalam konteks ini, tampak beberapa wilayah perdesaan yang sudah ditetapkan kedudukannya sebagai Desa Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Konawe. Akan tetapi, ketika dikaji dan dianalisis secara mendalam justru masih berada pada level Desa Maju. Hal itu juga terjadi pada beberapa wilayah perdesaan yang sudah dikategorikan sebagai Desa Maju, namun kenyataannya masih dalam posisi Desa Berkembang.

*Kedua*, sesuai perspektif Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggolongkan wilayah pedesaan dalam tingkatan desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Maka hasil penelitian menunjukkan keberadaan Desa Tambeanga Kecamatan Laonti berada dalam posisi dan statusnya sebagai Desa Tertinggal dan bahkan bisa dikategorikan sebagai desa sangat tertinggal. Pasalnya, keadaan geografis wilayah pedesaan ini adalah menunjukkan faktor keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas serta infrastruktur jalan yang masih sempit dan berlubang serta tidak ada penerangan. Selain wilayah pedesaan Tambeanga Kecamatan Laonti terletak sangat jauh Ibu Kota Kecamatan, juga keadaan warga masyarakatnya tampak terisolir dari sentral aktivitas sosial ekonomi dan aktivitas penting lainnya.

*Ketiga*, adapun langkah-langkah strategis yang urgent diajukan oleh pihak Peneliti untuk membangun wilayah pedesaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta maju atau meningkat dari keadaannya sebagai Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal menuju kepada Desa Berkembang (Madya), hingga mencapai status sebagai Desa Maju dan kemudian berkembang menjadi Desa Mandiri (Sembada), adalah: (1) adalah sangat perlu diupayakan maksimalisasi fungsional TKPKD sebagai lembaga struktural terhadap program pemberdayaan di wilayah pedesaan; (2) semua pihak selaku stakeholder dan aktor pembangunan wilayah pedesaan sangat penting mengetahui dan mengimplementasikan siklus pembangunan partisipatif secara integral terhadap

program pembangunan fisik dan pemberdayaan di wilayah perdesaan; (3) proses pelaksanaan Musrenbang yang merupakan salah satu indikator perencanaan pembangunan partisipatif yang kategori modern, seyogyanya diintegrasikan dengan pranata dan kelembagaan sosial desa setempat, sehingga semua keinginan dan kebutuhan warga masyarakat dapat terjangkau; (4) pelaksana dan aktivis serta relawan pronangkis dan pembangunan wilayah perdesaan, sebaiknya terlebih dahulu diinjeksi dengan nilai-nilai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sebagai *IESQ Power* melalui sebuah training pembangunan karakter yang berkelanjutan supaya menyadari eksistensi dan tanggung jawab sosialnya; dan (5) pada gilirannya potensi *IESQ Power* dapat membangkitkan software relasi interkoneksi sebagai modal sosial religius bagi seluruh stakeholder pembangunan wilayah perdesaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albab, U., Muta'ali, L., Kurniawan, A. (2019). Analisis tipologi desa tertinggal di Kabupaten Bojonegoro. *Media Komunikasi Geografi*, 20(2), 128. <https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.19491>.
- Ambarwati, D. (2019). Pemanfaatan modal sosial dalam upaya meningkatkan kemandirian mantan tenaga kerja indonesia di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Penelitian*, 13(1), 123. <https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4191>.
- Asy Syahid, N., Suwarni, S. (2018). Analisis SWOT sebagai dasar strategi pemasaran pada produk Airum (Air Minum Um). *Ekonomi Bisnis*, 23(1), 21. <https://doi.org/10.17977/um042v23i1p21-28>.
- Augustine, D., Anondho. (2019). *Proyek Konstruksi Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2016 Indeks Pembangunan Desa (IPD)*. 2(3), 227–236.
- Eka, E., Astuti, W., Aguswan, A. (2021). Penguatan kelembagaan desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(2). <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7562>.
- Geni, P., Studi, P., Teknik, S., Tarumanagara, U., Studi, P., Teknik, S., Tarumanagara, U. (2020). *Pengaruh Faktor Karakteristik Demografi Terhadap Biaya Proyek Infrastruktur Desa Tertinggal*. 3(1), 215–222.
- Hardiningtyas, D., Tama, I. P., Setyanto, N. W., Lukodono, R. P. (2019). Potential mapping of Beton Village, Ponorogo based on social, economic, and environmental aspects. *Journal of Innovation and Applied Technology*, 5(1), 855–864.
- Hidayati, R. A. (2021). Analisis potensi desa berbasis Indeks Pembangunan Desa di wilayah pesisir Kabupaten Gresik. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.30587/jre.v4i1.2161>
- Jannah, U., Muchlisoh, S. (2021). Pembentukan Indeks Ketahanan Air Rumah

- Tangga Di Indonesia Menurut Lima Aspek Ketahanan Air Unwater Tahun 2018. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 1081–1093. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.596>
- Kristanto, T., Hadiansyah, W. M., Nasrullah, M., Amalia, A., Anggraini, E. Y., Firmansyah, A. (2020). Strategi pemasaran digital dalam peningkatan penerimaan mahasiswa baru menggunakan analisis SWOT. *Multinetics*, 6(2), 128–133. <https://doi.org/10.32722/multinetics.v6i2.3415>
- Mandasari, (2021). Analisis faktor-faktor pembangunan desa dan strategi menuju desa mandiri (Studi kasus di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci). *Jurnal Administrasi Nusantara*, 4(1), 62–72. <https://doi.org/10.51279/jan.v4i1.483>
- Otheliansyah, G., Yasni, R. (2021). Pengaruh Penyaluran Dana Desa pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 330–346. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.267>
- Peribadi, (2015). Reconstruction of Participatory Paradigm Based on ESQ Power, A Strategy of Power Overcoming in Kendari City, Southeast Sulawesi, Lambert Academic Publishing (LAP), Germany.
- Peribadi, dkk., (2019). Konstruksi Perencanaan Participatory Berbasis Budaya Kalosara, Sebuah Perspektif Sosiologi Pembangunan, Deepublish Anggota IKAPI, Yogyakarta.
- Peribadi, dkk., (2021). Strategi Pembangunan Partisipatif Menuju Desa Masa Depan, Literasi Nusantara, Malang.
- Peribadi, dkk., {2022}. Potensi dan problematika wilayah perdesaan: Menyoal keberadaan desa-desa tertinggal. Penerbit Adab: Jawa Barat.
- Peribadi., Anggraeni, D. (2022). Paradigma, Pendekatan dan Multimetodologi: Sebuah Riset Pembebasan Menuju Post Kualitatif, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Pradana, B. E., Muin, M. F. (2020). Analisis diskriminan untuk menentukan status ketertinggalan desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 21(4). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1546>.
- Prayitno, G., Maulida RF, B., Nugraha, A. T. (2019). Modal sosial, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan Desa Ngadireso, Indonesia. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.20961/region.v14i2.30018>.
- Puspasari., Koswara. (2019). *Arahan Pengembangan Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek*. 5(2).
- Rukayat, Y., Bandung, U. N., Desa, P., & Wirausaha, B. (2021). Kombinasi resiprokal asas rekognisi dan. *Academia Praja*, 4, 180–200.
- Suwarno, S., Pramono, T. (2020). Analisis SWOT Balanced Scorecard (Bsc) Dalam Kebijakan Pengembangan Umkm Batik di Kabupaten Kediri. *E-Jurnal*

*Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 653.

<https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p04>

Thamrin, D. A., Habibi, B., Sari, D. P., A Thief, F. H. N. (2020). Analisis strategi Islamic Collective Entrepreneurship (ICE): Solusi mengatasi desa tertinggal. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 45–56.

<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11059>

Xaverius et al., (2021). Perkembangan Desa Berdasarkan Village Progress By Village Developing Index. *Perkembangan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Mompawah*, 7(1), 10–20.